

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MADRASAH

(Studi Kasus pada MI Arrosidiyah Sumberagung
Rejotangan Tulungagung)

Suprihno

STAI Muhammadiyah Tulungagung
hasbiatt@gmail.com

ABSTRACT: *Funding is one of necessary inputs in education; it is necessary in order to implement all policies and programs to achieve the goals of the school and the quality of education. Madrasah as Islamic education institutions provide a major contribution of education in Indonesia, but not all Islamic school gets adequate education costs from the government. This study aims to determine how education funding of Islamic education in the MI Arrosidiyah Sumberagung Rejotangan Tulungagung. This study used a qualitative approach. The study was conducted through the source data from informants and documents, through data collection techniques such as observation, interviews, and documentation, as well as using data analysis techniques of data reduction, data presentation, and verification. The results showed (1) Budgeting education plan in Madrasah RKAM, needs 2014 budget of 84.22 million rupiahs sourced from the BOS funds 71.92 million rupiahs, BPPDGS, 10.8 million rupiahs, and the public donation of 1.5 million rupiahs. (2) use of budgeting the biggest MI Arrosidiyah used for teacher salaries amounted to 63.60%, next to school facilities by 10.41%, and the smallest funding to increase the competence of teachers by 2.98%. The unit cost 338,870.98 rupiahs while the amount of student unit, cost per hour; 273.85 Rupiahs. (3) Accountable education funding is transparent to the school committee, fundraising and teachers, and to Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.*

Pembiayaan merupakan salah satu input yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan, hal ini

diperlukan agar dapat melaksanakan semua kebijakan dan program sekolah untuk mencapai tujuan dan kualitas pendidikan. Madrasah sebagai lembaga pendidikan islam memberikan kontribusi yang besar dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, akan tetapi tidak semua madrasah mendapatkan biaya pendidikan yang memadai dari pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembiayaan pendidikan madrasah di MI Arrosidiyah Sumberagung Rejotangan Tulungagung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan melalui sumber data dari informan dan dokumen, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) perencanaan anggaran disusun dalam RKAM, kebutuhan anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 84.220.000 bersumber dari dana BOS Rp. 71.920.000, BPPDGS, Rp. 10.800.000, dan sumbangan masyarakat Rp. 1.500.000. (2) Realisasi pembiayaan terbesar digunakan untuk gaji guru sebesar 63,60% , selanjutnya untuk sarana sekolah sebesar 10,41%, dan pembiayaan terkecil untuk peningkatan kompetensi guru sebesar 2,98%. Unit cost siswa pertahun; Rp. 338.870,98 sedangkan besarnya unit cost siswa perjam; Rp. 273.85. (3) pertanggungjawaban dilaksanakan secara transparan kepada komite sekolah, pengurus yayasan dan kepada Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.

Keyword: *Pembiayaan Pendidikan, Penganggaran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban.*

Pendahuluan

Tumbangnya rezim orde baru sejak 22 Mei 1998, membawa dampak yang cukup besar dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, politik dan budaya. Setelah sistem politik nasional berubah dan mengarah pada transisi demokrasi dari sistem represif dan otoriter diharapkan mampu membawa dampak yang positif dalam kehidupan dan jalannya pembangunan terutama dalam bidang pendidikan, karena pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam menyiapkan sumber daya pembangunan bangsa.

Perubahan dan perbaikan sistem pendidikan nasional terus

dilakukan pemerintah termasuk penataan pendidikan berbasis agama Islam di bawah Kementerian Agama. Madrasah dijadikan sub-sistem dari pendidikan nasional, melalui Undang-Undang no. 2 tahun 1989. hal ini berarti pengelolaan, mutu, kurikulum, pengadaan tenaga, dan penyelenggaraan pendidikan juga berlaku untuk madrasah.

Ada beberapa faktor mengapa pendidikan agama Islam dijadikan sub-sistem pendidikan nasional: *Pertama* bahwa pendidikan Islam di Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. *Kedua* semangat dan gairah umat Islam untuk bangkit dan mengaktualisasikan ajaran Islam ke dalam kehidupan institusi pendidikan. Hal ini ditujukan untuk membangun masa depan Indonesia dengan dilandasi oleh nilai-nilai religius dan moral yang kuat.¹ Oleh karena itu pendidikan Islam bukan lagi merupakan *the second choice* tetapi justru merupakan *the first choice*.

Sungguhpun demikian pendidikan Islam di Indonesia telah berjalan lama dan mempunyai sejarah panjang² namun dirasakan, pendidikan Islam tersisih dari sistem pendidikan nasional. Menurut H.A.R Tilaar (2004) lemahnya pendidikan Islam mengakibatkan pendidikan tersebut tersingkir dari mainstream pendidikan nasional sehingga terjerembab dalam dualisme yang artificial. *Pertama*; dikotomi pendidikan Islam yang sekuler dengan pendidikan Islam. *Kedua*; pemikiran pembaharuan dalam pendidikan Islam, yang disebut oleh Malik Fajar³ (1998) sebagai kekuatan yang magmatis, akibat tuntutan globalisasi dan kebutuhan profesionalisme. Tuntutan tersebut harus direspon secara cepat jika tidak ingin kembali pada ortodoksi dan *the band wagon of modernity* yang didambakan oleh masyarakat.

Semua biaya yang dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun swasta untuk sektor pendidikan baik pada sekolah negeri dan sekolah swasta merupakan investasi. Investasi dalam bidang pendidikan akan diperoleh dalam jangka waktu cukup lama namun bersifat jangka panjang dan memiliki efek berlipat ganda (*multiplier effects*).⁴

¹Hasbullah, *Otonomi Pendidikan, kebijakan otonomi daerah dan implikasinya, terhadap penyelenggaraan pendidikan* (Jakarta: Rajawali press2006), hlm.148.

²Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, mengenai pondok Pesantren dan Madrasah* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 138 – 207.

³A. Malik Fajar, *Madrasah dan tantangan Modemitas* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. xi.

⁴Mohammad Ali, *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi* (Bandung: Imtima, 2009), hlm. 189.

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana pembiayaan pendidikan madrasah pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Arrosidiyah Sumberagung Rejotangan Tulungagung.

Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah

Didalam pembukaan UUD 1945 di nyatakan bahwa tujuan kita membentuk negara kesatuan Republik Indonesia ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang dapat *survive* di dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan yang dihadapinya.⁵

Membangun kehidupan bangsa adalah salah satu dari empat tujuan kemerdekaan Indonesia. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Sejalan dengan hal itu, pendidikan menjadi hak setiap warga negara, bahkan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mendanainya.

Sistem pendidikan di Indonesia memiliki dua sub-sistem utama, yaitu sub-sistem pendidikan sekolah di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan sub-sistem pendidikan madrasah dan pendidikan Agama di bawah pengelolaan Kementerian Agama (Kemenag). Dari sekitar 233.517 lembaga pendidikan sekolah umum dan madrasah, 82 persennya adalah sekolah umum dan 18 persennya madrasah; dan dari sekitar 49.402.000 peserta didik sekolah umum dan madrasah, 87 persennya terdaftar di sekolah umum dan 13 persennya masuk di madrasah.

Pendidikan Islam di Indonesia telah berjalan lama pada masa penjajahan sampai sekarang dan mempunyai sejarah panjang. Selama berabad-abad pendidikan Islamlah satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, hal ini terjadi sebelum masuknya penjajah Belanda dan memperkenalkan sistem pendidikan baru pada abad ke-19. Penyelenggaraan pendidikan selama ini dilaksanakan di surau,

⁵Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah* (Jakarta: Adicitra Karya Nusa, 2001), hlm. xxxi.

majelis taklim, dan pondok pesantren sudah menyatu dengan masyarakat dan mempunyai basis yang mengakar sangat kuat dalam kehidupan berbangsa, sehingga memiliki tempat yang sangat strategis, dalam menguatkan cita-cita pembangunan nasional yang ingin menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya oleh kekuatan iman dan taqwa.

Berdasarkan aspek program dan praktek penyelenggaraan pendidikan Islam, Buchori (1989), menyampaikan bahwa pendidikan Islam dapat dikelompokkan dalam lima jenis, yaitu (1). Pendidikan Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah, (2). Pendidikan Madrasah, yaitu sekolah umum yang berciri khas agama Islam seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan IAIN/STAIN, (3). Pendidikan umum yang bernafaskan Islam yang diselenggarakan oleh Yayasan dan Organisasi Islam; (4). Pelajaran Agama Islam yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan sebagai suatu mata pelajaran atau mata kuliah; (5). Pendidikan Islam dalam keluarga dan masyarakat atau ditempat-tempat Ibadah, atau forum kajian ke-Islaman, majelis taklim termasuk pendidikan Islam non formal dan pendidikan Islam formal.⁶

Biaya Pendidikan

Undang-Undang Tahun 2003 tentang Pendidikan (UU No. 20/2003) yang dikenal sebagai “Sisdiknas” menyatakan bahwa dana untuk pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Namun khusus untuk pendidikan dasar (kelas 1-9), pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana untuk menyediakan pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia antara tujuh sampai dengan lima belas tahun tanpa memungut biaya apapun, apakah pendidikan tersebut diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Untuk membiayai pendidikan ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mengalokasikan paling tidak 20% dari anggaran tahunannya (APBN dan APBD) untuk membiayai investasi, operasional dan biaya personil.

Biaya pendidikan adalah total biaya yang dikeluarkan baik oleh individu peserta didik, keluarga yang menyekolahkan anak, warga masyarakat perorangan, kelompok masyarakat, maupun yang

⁶H. Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam; Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum Hingga Redefinisi Islamisasi Pengetahuan* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2003), hlm. 13.

dikeluarkan oleh pemerintah untuk kelancaran pendidikan.⁷ Dengan demikian biaya memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan.

Sumber pendanaan utama baik untuk madrasah negeri maupun swasta adalah dari pemerintah dengan kontribusi kecil dari masyarakat, meskipun proporsi dana dari masyarakat cenderung meningkat pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Proporsi perbandingan pemerintah dan masyarakat untuk MI Negeri adalah 96:4, 91:9 untuk MTs Negeri dan 88:11 untuk MA Negeri. Proporsi dana pemerintah dan masyarakat untuk madrasah swasta adalah 75:25 untuk MI Swasta, 70:30 untuk MTs Swasta dan 42:58 untuk MA Swasta.⁸

Dana Pendidikan yang Diterima per Peserta Didik (Rp) dari pemerintah dan Masyarakat.⁹

Status dan level madrasah	Dana Pendidikan yg di terima per peserta didik (Rp)			Sumber dana (%)	
	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Pemerintah	Swasta
MI Negeri	1,145,000	12,428,000	5,525,000	95.60	4.40
MI Swasta	95,890	3,462,000	1,016,000	75.50	24.50
MTs Negeri	3,949,000	9,996,000	6,945,000	91.40	8.60
Mts Swasta	201,271	11,630,714	2,646,000	69.10	30.90
MA Negeri	5,056,314	17,868,00	10,050,000	81.30	18.70
MA Swasta	419,556 7	870,000	2,533,000	41.90	58.10

Biaya pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008. Pembiayaan pendidikan ini meliputi:

1. Biaya satuan pendidikan, adalah biaya penyelenggaraan pendidikan yang meliputi biaya investasi, biaya operasional, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa;
2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemprov, pemko/pemkab, atau

⁷Dadang Suhardan, Riduwan, dan Enas, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 22.

⁸ACDP, *Studi Pendanaan Pendidikan Madrasah di Indonesia* (Jakarta: Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013), hlm. 15.

⁹*Ibid*, hlm. 16.

penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat/yayasan;

3. Biaya pribadi peserta didik, adalah biaya operasional yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.¹⁰

Penganggaran Pembiayaan Pendidikan

Penganggaran atau *budgeting* merupakan proses penyusunan anggaran. Anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga (estimasi kinerja) selama periode tertentu dalam ukuran finansial. Penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan.

Penyusunan rencana anggaran ini dituangkan ke dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dalam satu tahun. Langkah penyusunan RKAS dapat dilakukan dengan cara berikut:

- a) Menginventaris program kegiatan sekolah selama satu tahun mendatang;
- b) Menyusun program kegiatan tersebut berdasarkan jenis kerja dan prioritas;
- c) Menghitung volume, harga satuan dan kebutuhan dana untuk setiap komponen kegiatan;
- d) Membuat kertas kerja dan lembaran kerja, menentukan sumber dana dan pembebanan anggaran serta menuangkan ke dalam format baku RKAS/RKAM;
- e) Menghimpun data pendukung yang akurat untuk bahan acuan guna mempertahankan anggaran yang diajukan.¹¹

Penggunaan Pembiayaan Pendidikan

Dana yang diperoleh dari berbagai sumber digunakan untuk kepentingan sekolah khususnya kegiatan belajar-mengajar secara efektif dan efisien. Penggunaan dan pengeluaran dana harus

¹⁰Ary Hidayat dan Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan* (Bandung: Pustaka Educa, 2010), hlm. 166.

¹¹Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 269.

didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan rencana anggaran pembiayaan sekolah.¹²

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan pemerintah untuk sekolah disalurkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional langsung ke sekolah. Pelaksanaan program tersebut mengikuti Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009, meliputi antara lain:

- a) Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran;
- b) Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran;
- c) Penggandaan soal dan penyediaan lembar jawaban dalam kegiatan ujian;
- d) Pembelian peralatan pendidikan;
- e) Pembelian bahan habis pakai;
- f) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler;
- g) Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah;
- h) Langganan daya dan jasa lainnya;
- i) Kegiatan penerimaan siswa baru;
- j) Penyusunan dan pelaporan.¹³

Pembiayaan sekolah ditujukan untuk membiayai segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan keperluan sekolah. Setiap dana yang masuk ke sekolah digunakan untuk keperluan sekolah yang berbeda-beda oleh penanggungjawab setiap kegiatan melalui persetujuan kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai manajer juga memiliki fungsi otorisator. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran.

Pertanggungjawaban Pembiayaan Pendidikan

Pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan merupakan salah satu proses yang harus dilakukan dalam pengelolaan Pembiayaan pendidikan. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pengelolaan

¹²Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Rosdakarya, 2002) hlm. 177.

¹³Dirjen Pendidikan Menengah Kemendiknas, *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas Tahun 2013*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, 2013), hlm. 6.

dana pendidikan harus berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.¹⁴

Proses ini menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan dana kepada pihak berwenang. Oleh karena itu dalam evaluasi pembiayaan, kepala sekolah harus melihat dan mencocokkan antara kegiatan dengan biaya yang digunakan, serta hasil dari kegiatan tersebut.

Pada tahap akhir pengelolaan pembiayaan, tugas bendaharawan dan pimpinan adalah membuat laporan keuangan sebagai bukti pelaksanaan berbagai kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.¹⁵ Hal itu menunjukkan bahwa laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan penggunaan dana kepada pemerintah maupun masyarakat, sehingga tercipta kepercayaan dari pihak pemberi dana.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, Metode deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian yang memfokuskan penekanannya pada aspek kondisi riil di lapangan, proses yang dilakukan dan makna suatu tindakan yang diamati secara holistik (*komprensif*) dimana suasana, tempat, dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.¹⁶ Menurut Bogdan dan Biklen, untuk memperdalam penelitian kualitatif dapat digunakan studi kasus.¹⁷

Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit. Tetapi ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam. Penelitian kasus yang dilakukan oleh peneliti terhadap

¹⁴Sujanto, Bedjo. *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah, Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah* (Jakarta: Sagung Seto, 2007), hlm. 50.

¹⁵*Ibid*, hlm. 70.

¹⁶Satori, Djam'an dan Komariah, Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm. 28.

¹⁷Bogdan dan Biklen, *Qualitative Research for Education, an Introduction to Theories and Methods* (Boston: Pearson Allyn and Bacon, 2007), hlm. 70.

suatu sekolah, kesimpulan penelitian tersebut hanya berlaku bagi sekolah yang diteliti.¹⁸

Pembiayaan pendidikan madrasah dalam penelitian ini menfokuskan pada; penganggaran pembiayaan pendidikan, penggunaan biaya pendidikan dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh langsung oleh peneliti dari informan, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, tenaga kependidikan, serta pihak yayasan MI Arrosidiyah Sumberagung Rejotangan Tulungagung. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti RKAS/RKAM, nilai Ujian Nasional, serta data lainnya yang relevan dengan fokus penelitian mengenai pembiayaan pendidikan.

Pengambilan data dengan metode *proporsif sampling* data diskriptifnya dengan melihat data dokumen yang ada di madrasah, sehingga peneliti dapat menggambarkan kembali temua-temua di lapangan kemudian dianalisa sehingga diperoleh satu kesimpulan terhadap subyek penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data kualitatif sebagaimana yang telah diuraikan, teknik pengumpulan data yang dipakai adalah pertama : observasi (*partisipative dan Non Participative Observation*), kedua: Wawancara mendalam (*In depth Interview*) dan ketiga: dokumentasi. Dalam rentang waktu tersebut peneliti menerapkan langkah - langkah sebagaimana sebagai berikut; *Invention, discovery, Interpretation dan Explanation*.¹⁹

1. *Invention* adalah tahapan untuk melakukan serangkaian observasi secara menyeluruh terhadap fenomena di lapangan.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 142.

¹⁹Milles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 2007), t.h.

2. *Discovery* adalah tahap penemuan data dilapangan sebelum melaksanakan pengumpulan data, terlebih dahulu dilakukan penentuan identifikasi data primer secara holistik.
3. Melakukan serangkaian kerja lapangan yaitu dengan jalan wawancara dengan objek ataupun pihak yang mengenal objek penelitian, dan orang yang dapat dijadikan sumber sekunder dalam penelitian ini.

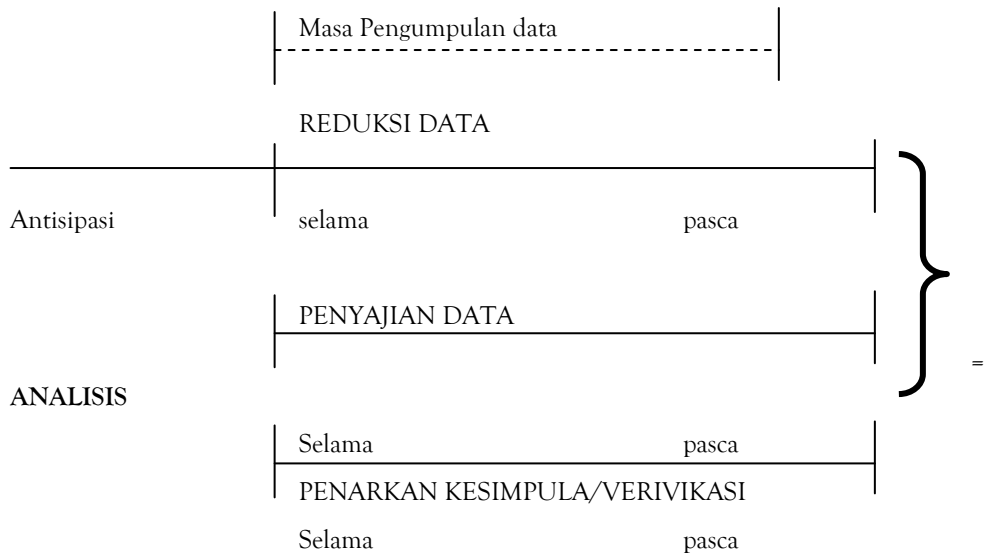
Teknik Analisa Data

Analisis data dilakukan sepanjang penelitian dan dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data deskriptif kualitatif menurut Miles and Huberman dalam Sugiono (2009), Bungin (2007) mengemukakan bahwa aktifitas analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas.²⁰ Analisa data meliputi:

- a) Melakukan *reduction* terhadap data, yaitu membuang data yang tidak bisa masuk dalam table sesuai dengan klasifikasi dan katagori dalam penelitian.
- b) Melakukan *display data*, yaitu mendisplay data sampai pada sub-sub terkecil sesuai dengan klasifikasi data dan masalah yang dihadapi.
- c) Melakukan *conclution dwawing/verification* data yaitu mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh dan menginterpretasikan sesuai dengan data yang diperoleh dilapangan.

Analisa pada penelitian terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Secara skematis langkah - langkah penelitian dapat di gambarkan sebagai berikut:

²⁰Sugiono, *Metode Penelitian Untuk Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 246.



Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kondisi Sekolah

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Arrosidiyah terletak di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. berdiri pada 1986, dibawah Yayasan Arrodiyah dan dibina oleh Lembaga Ma'arif NU Tulungagung. Saat ini MI Arrosidiyah memiliki siswa 136 siswa, 11 guru, 2 tenaga administrasi dan 1 penjaga sekolah. MI Arrosidiyah telah banyak menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi, meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan saat ini lulusannya sudah terjun diberbagai lapisan masyarakat baik pemerintah maupun swasta.

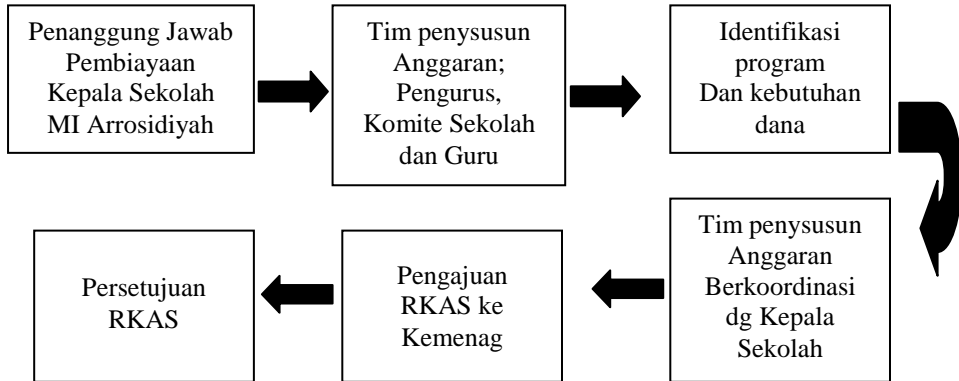
Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Perencanaan yang baik akan menghasilkan out put yang baik pula dalam sebuah organisasi termasuk dalam hal ini lembaga pendidikan sebagai sebuah organisasi. MI Arrosidiyah menyusun Rencana Anggaran Kegiatan Madrasah (RKAM), bersama seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan pendidikan di madrasah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan RKAM di lakukan pada bulan November - Desember, sebelum tahun ajaran baru, penyusunan RKAM di awali dengan melakukan rapat bersama terhadap laporan pembiayaan pendidikan di lanjutkan dengan evaluasi terhadap pelaksanaan pembiayaan tahun berjalan. Penyusunan RKAM demikian dimaksudkan agar proses pengelolaan

sekolah berjalan lancar, karena sekolah harus merencanakan pengelolaan berbasis penilaian kebutuhan sekolah.

Alur penyusunan RKAM di MI Arrosidiyah :



Berdasarkan alur tersebut bahwa MI Arrosidiyah menyusun RKAM dengan membentuk tim penyusun anggaran dengan melibatkan pengurus yayasan, komite sekolah dan guru. Dengan pelibatan pengurus yayasan, komite sekolah, dan guru akan diperoleh rencana yang matang, karena secara moral semua guru, komite sekolah, pengurus yayasan yang terlibat akan merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan rencana pendidikan tersebut, sehingga tanggung jawab tersebut tidak hanya terletak pada kepala sekolah.²¹

Peranan kepala sekolah sangat menentukan karena *man, money and material* tidak akan dapat berwujud tujuan yang akan dicapai jika tidak dikelola oleh seorang pemimpin kepala sekolah yang tangguh.²² Pelaksanaan suatu perencanaan harus didukung oleh prosedur kerja yang sistematis. Pembiayaan merupakan salah satu sumberdaya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan, hal tersebut dapat dicapai dengan peran pengelolaan pendidikan yang di tetapkan, hal inilah yang menjadi misi kepala sekolah MI Arrosidiyah.

²¹Sulistiyorini, *Manajemen Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 133.

²²Dadang Suhardan, Riduwan dan Enas, *Ekonomi dan Pembiayaan pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 66.

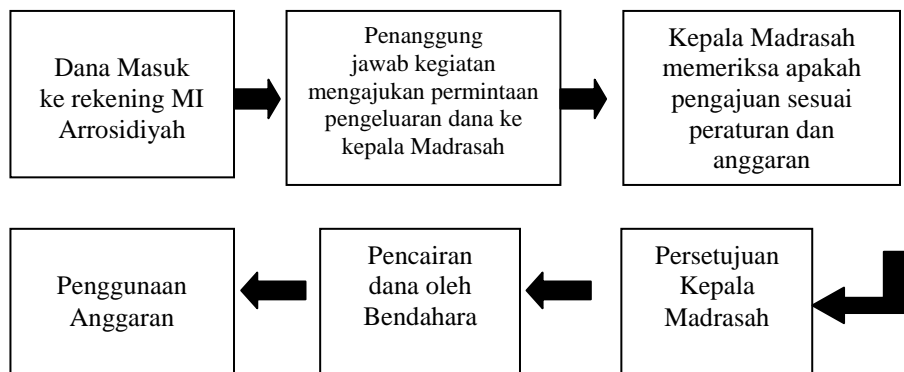
RKAM Tahun 2014 sebagai berikut :

No	Penerimaan	Jumlah	No.	Pengeluaran	Jumlah
I.	Bantuan Pemerintah		I	Pengeluaran Operasional	
	1. BOS : 124 x 580.00/thn	71.920.000		1. Belanja Pegawai	53.562.000
	2. Bosda/BPPDGS: 3x300.000/bln	10.800.000		2. Belanja Barang	19.378.000
II.	Dana Komite Sekolah			3. Belanja Pemeliharaan	8.770.000
	1. Iuran Orang Tua	-		4. Belanja Modal	-
	2. Sumbangan Sukarela	1.500.000	5. Belanja lain - lain	2.510.000	
	3. Usaha Lain	-			
III.	Penerimaan Lainnya	-			
	Jumlah Penerimaan	84.220.000		Jumlah Pengeluaran	84.220.000,-

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa sumber penerimaan MI Arrosidiyah berasal dari dana BOS pemerintah pusat sebesar Rp. 71.920.000 sedangkan dana dari BOSDA/BPPGDS pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung sebesar Rp. 10.800.000 dan Dana dari masyarakat melalui komite sekolah sebesar Rp. 1.500.000. hal ini berarti biaya operasional pendidikan MI Arrosidiyah berasal dari APBN sebesar 85,40%, sedangkan 12,40% berasal dari APBD Kabupaten Tulungagung, dan 1,7% dari dana masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa yayasan tidak memiliki peran yang cukup untuk mendukung pembiayaan pendidikan.

Penggunaan Pembiayaan Pendidikan

Setelah proses penganggaran pembiayaan madrasah selesai RKAM disetujui oleh semua pihak yang terlibat, maka langkah selanjutnya dalam manajemen pembiayaan adalah penggunaan terhadap anggaran biaya yang telah dibuat dan pengeluaran untuk berbagai kebutuhan madrasah secara efektif dan efisien. Alur dan tahapan penggunaan dana pada MI Arrosidiyah sebagai berikut :



Hal yang tak kalah penting dalam pengelolaan dan penggunaan pembiayaan sekolah adalah aspek akunting dan pembukuan. Pembukuan merupakan keseluruhan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana secara kronologis dan teratur sesuai dengan aturan dan transparan inilah yang dilakukan Bendahara MI Arrosidiyah.

Penyaluran dana oleh pemerintah dilakukan dalam dua tahap yaitu periode Januari-Juni dan periode Juli-Desember setiap tahunnya, sedangkan dana dari kabupaten dilakukan setiap triwulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika sekolah kekurangan dana maka pihak sekolah berusaha menggali pembiayaan dari sumber-sumber lain, seperti orang tua siswa dan masyarakat setelah mendapat persetujuan dari orangtua siswa, komite sekolah dan yayasan. sehingga bendahara madrasah harus kreatif. Seperti keperluan kelas, acara perpisahan PHBN atau PHI.

Dana yang diperoleh dari berbagai sumber berusaha digunakan MI Arrosidiyah sesuai dengan rencana dan program untuk mencapai target dan tujuan pembelajaran sekaligus tujuan madrasah. Realisasi Anggaran MI Arrosidiyah tahun 2014 sebagai berikut :

NO	Alokasi Anggaran	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Gaji Guru	53,562,000.00	63.60
2.	Sarana Sekolah	8,770,000.00	10.41
3.	Kesiswaan	7,630,000.00	9.06
4.	Sarana Pembelajaran	6,900,000.00	8.19
5.	Pengelolaan	4,848,000.00	5.76
6.	Peningkatan Kompetensi Guru	2,510,000.00	2.98
	Jumlah	84.220.000,-	100 %

Mutu pendidikan akan sangat ditentukan oleh tetapan dalam pengalokasian sumber-sumber yang secara langsung berhubungan dengan elemen-elemen mutua atau keunggulan (*exelency*) sasaran yang harus diberi biaya prioritas dalam pendidikan.²³ Berdasarkan tabel diatas Madrasah telah mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan. Alokasi anggaran terbesar digunakan untuk gaji guru sebesar 63.60 %, hal ini sesuai dengan hasil survey Asian Model yang menunjukkan bahwa proporsi gaji guru merupakan proposi terbesar dalam keseluruhan biaya operasional pendidikan.²⁴ Moh. Idochi Anwar mengemukakan bahwa dalam proses belajar mengajar, nilai pengoraban guru menempati urutan terasas ketimbang unsur lain.²⁵ Dalam proses pembelajaran dapat pula di dinilai sebagai *input* dan dijadikan sebagai ukuran produktivitas kinerja, yang akan mempengaruhi kualitas pembelajaran dan kualitas siswa.

Dari data penelitian menunjukkan bahwa anggraan peningkatan kompetensi guru mendapatkan porsi paling kecil diantara alokasi anggaran lainnya sebesar 2.98%, hal ini menunjukkan bahwa minimnya perhatian pihak sekolah terhadap peningkatan kualitas guru, yang semestinya mendapat perhatian yang lebih sehingga peningkatan kemampuan mengajar melalui berbagai pelatihan dan pendidikan yang relevan dapat di laksanakan.

Hasil analisis *unit cost* siswa pertahun dan perjam pelajaran menunjukkan bahwa *Unit cost* siswa pertahun sebesar; Rp. 338.870,98 sedangkan besarnya *unit cost* siswa perjam pelajaran sebesar ; Rp. 273.85. hal ini menunjukkan bahwa MI Arrosidiyah mampu mengelola pembiayaan secara efektif dan efisien. Efektifitas dan fisiensi dalam pengelolaan pendidikan tidak hanya dapat dilihat dari jumlah tetapi juga dilihat dari segi kualitas, dimana setiap upaya dan pengorbanan yang diberikan mampu memberikan hasil yang lebih

²³Dadang Suhardan, Ridwan dan Enas, *Ekonomi dan pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 71.

²⁴*Ibid*, hlm. 70.

²⁵Moch. Idochi Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Managemen Biaya Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 152.

tinggi dan bermutu. Pengelolaan pendidikan secara lebih ekonomis ialah dengan pengorbanan yang diukur dengan cost yang minimal tetapi menghasilkan produk yang maksimal²⁶.

Pertanggungjawaban Pembiayaan Madrasah

Semua pengeluaran yang berasal dari sumber manapun harus dipertanggungjawabkan oleh sekolah. MI Arrosidiyah menerapkan prinsip transparansi dan kejujuran dalam menyusun laporan pertanggungjawaban guna meningkatkan dukungan dan kepercayaan orang tua siswa, masyarakat dan pemerintah, hal ini sesuai dengan prinsip pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.²⁷

Kepala sekolah MI Arrosidiyah melalui bendahara membuat laporan penggunaan dana dan surat pertanggungjawaban (SPJ), dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk laporan pertanggungjawaban pembiayaan MI Arrosidiyah dengan mengadakan rapat bersama komite sekolah, pengurus yayasan dan guru. Selanjutnya SPJ disampaikan juga kepada Kemenag kabupaten tulungagung setiap semester, dan kepada pemerintah kabupaten setiap triwulan.

Transparansi pengelolaan anggaran pendidikan akan meningkatkan kepercayaan terhadap sekolah, karena anggaran memiliki kedudukan penting, seorang penanggungjawab program harus mencatat anggaran serta melaporkan realisasinya sehingga dapat dibandingkan selisih antara anggaran dengan pelaksanaan serta melakukan tindakan lanjut untuk perbaikan.²⁸ Selain laporan pertanggungjawaban dalam bentuk SPJ yang di sampaikan MI Arrosidiyah juga di periksa oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setiap akhir program *Invest* yang dilaksanakan.

Guna mewujudkan akuntabilitas sekolah, memang perlu membuat laporan berkala tentang penyelenggaraan serta penggunaan dana yang diperoleh. Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada pihak pemberi dana baik itu pemerintah, maupun masyarakat sehingga tercipta kepercayaan yang tinggi.

²⁶*Ibid*, hlm. 157.

²⁷Hartini, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012), hlm. 156.

²⁸Muhaimin, suti'ah, dan sugeng Listya Prabowo, *Manajemen pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 357.

Penutup

Penganggaran pembiayaan pendidikan di MI Arrosidiyah di susun dalam rencana kegiatan anggaran madrasah (RKAM), kebutuhan anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 84.220.000, bersumber dari dana BOS Rp. 71.920.000, BPPDGS, Rp. 10.800.000, dan sumbangan masyarakat Rp. 1.500.000.

Realisasi pembiayaan MI Arrosidiyah terbesar digunakan untuk gaji guru sebesar 63,60%, selanjutnya untuk sarana sekolah sebesar 10,41%, dan pembiayaan terkecil untuk peningkatan kompetensi guru sebesar 2,98%. *Unit cost* siswa pertahun; Rp. 338.870,98 sedangkan besarnya *unit cost* siswa perjam; Rp. 273.85.

Pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan MI Arrosidiyah dilaksanakan secara transparan kepada komite sekolah, pengurus yayasan dan guru dalam rapat bersama, selanjutnya di sampaikan kepada Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.

Bagi madrasah sehubungan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan, perlu kiranya untuk selalu melaksanakan manajemen sekolah yang efektif dan efisien serta transparan. Sehingga, apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Perlu kiranya sekolah melakukan analisis besarnya biaya satuan per siswa (*unit cost*) dan efektivitas biaya (*cost effectiveness*), berguna untuk menilai dan memilih alternatif kebijakan ketika sumber daya terbatas dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, beberapa pendidikan lebih mahal daripada yang lain namun untuk hasil yang sama.

Bagi peneliti lanjutan perlu kiranya di kaji tentang efektifitas besarnya pembiayaan sekolah terhadap peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.

Daftar Pustaka

- ACDP, 2013, *Studi Pendanaan Pendidikan Madrasah di Indonesia*, Jakarta: Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ali, Mohammad, 2009. *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*, Bandung: Imtima.
- Anwar, M. Idochi. 2013. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bogdan dan Biklen. 2007. *Qualitative Research for Education: an Introduction to Theories and Methods*. Boston: Pearson Allyn and Bacon.
- Dirjen Pendidikan Menengah Kemendiknas. 2013. *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas Tahun 2013*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional.
- Fajar, A Malik , 1998. *Madrasah dan tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan.
- H, Muhaimin, 2003. *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam; Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum Hingga Redefinisi Islamisasi Pengetahuan*, Bandung: Nuansa Cendiki.
- Hartani. 2011. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Hasbullah, 2005. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, mengenai pondok Pesantren dan Madrasah*, Jakarta; rajawali press.
- , 2006. *Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Pendidikan dan Implementasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, Ary dan Imam Machali. 2010. *Pengelolaan Pendidikan*. Bandung: Pustaka Educa.
- Jalal, Fasli dan Supriyadi, Dedi, 2004. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Milles, Mattew B. dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Muhaimin, Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo. 2011. *Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Kencana.
- Mulyasa. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; Alfabeta.
- Sugiono, 2009. *Metode Penelitian Untuk Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suhardan, Dadang, Riduwan, dan Enas. 2012. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sujanto, Bedjo. 2007. *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah: Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Sagung Seto.
- Sulistiyorini. 2009. *Manajemen Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Syafaruddin. 2005. *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press.